

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

(Gasperz, 2019) yang meneliti tentang dampak Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Badan Pusat Statistik Wilayah Maluku). Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa metode yang digunakan yaitu metode analisis regresi berganda. Penelitian ini menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

(Apriana & Ayu, 2021) Pengaruh Kualitas Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penggunaan Teknologi Informasi dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Bumdes Se-Kecamatan Sukawati. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa metode yang digunakan yaitu metode analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kompetensi sumber daya manusia memiliki hal yang positif dan signifikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, penggunaan teknologi informasi tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan, pengalaman kerja memiliki efek positif dan signifikan pada kualitas laporan keuangan.

(Fakhri et al., 2021) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Survei pada SKPD di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat). Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dan metode regresi sederhana dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 24.0. Hasil menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD.

Dengan demikian, Ketidakonsistenan ini menunjukkan bahwa meskipun kompetensi sumber daya manusia tampaknya selalu berkontribusi positif, hasil terkait pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal bervariasi. Hal ini menandakan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil tersebut.

B. Tinjauan Pustaka

1. Teori Stakeholder (Stakeholder Theory)

Teori pemangku kepentingan yang diperkenalkan oleh Freeman (1984) menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam suatu organisasi, bukan hanya kepentingan pemegang saham. Pemangku kepentingan dalam konteks BUMDes meliputi masyarakat, pemerintah, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap pengelolaan dan kinerja BUMDes. Teori ini menyatakan bahwa keberhasilan suatu organisasi bergantung pada kemampuan memenuhi harapan dan kebutuhan berbagai pemangku kepentingannya.

Kompetensi Sumber Daya Manusia memainkan peran kunci dalam memenuhi harapan pemangku kepentingan. Menurut Ulrich (1997), kompetensi yang tinggi dalam manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia akan berdampak positif terhadap kinerja suatu perusahaan. Dalam konteks BUMDes, pengelola yang kompeten mampu menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan transparan yang penting bagi pemangku kepentingan untuk menilai kinerja dan akuntabilitas BUMDes. Hal ini sesuai dengan penelitian (Dani & Putra, 2022) yang menunjukkan bahwa kompetensi karyawan berkorelasi positif dengan kualitas informasi yang disajikan.

Pemanfaatan teknologi informasi juga sangat relevan dengan teori pemangku kepentingan. Teknologi dapat meningkatkan komunikasi dan interaksi antara BUMDes dan pemangku kepentingan. Menurut Laudon dan Laudon (2016), sistem informasi yang efektif memungkinkan organisasi menyajikan informasi yang relevan dan terkini kepada pemangku kepentingan, sehingga meningkatkan transparansi. Dalam konteks pelaporan keuangan, TI membantu lembaga membuat laporan yang memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

Sistem pengendalian intern berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BUMDes. Menurut COSO (2013), sistem yang baik memastikan bahwa semua proses dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, yang penting untuk membangun

kepercayaan di antara pemangku kepentingan. Melalui pengelolaan yang efektif, BUMDes dapat meminimalkan risiko penyimpangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal ini menjadi informasi penting bagi pemangku kepentingan dalam melakukan evaluasi kinerja dan keberlanjutan BUMDes.

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 UU Nomor 6 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa adalah Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang selanjutnya disebut BUMDesa. Badan tersendiri yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa, yang berasal dari penyertaan langsung kekayaan desa, dan yang mengelola aset, pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi mengacu pada kemampuan seseorang untuk menerapkan dan menunjukkan keterampilan yang dimilikinya. Dalam konteks sumber daya manusia, kompetensi mencakup berbagai aspek, termasuk tingkat pendidikan, pelatihan yang telah diikuti, serta pengalaman yang cukup dari individu tersebut untuk menyelesaikan tugas yang diamanatkan kepadanya. Dalam menjalankan fungsinya, akuntansi tidak hanya sekadar mencatat dan menyusun laporan keuangan. Namun, juga memerlukan kemampuan untuk menentukan perlakuan akuntansi yang tepat terhadap suatu transaksi, serta merancang dan menganalisis berbagai aspek terkait.

Kompetensi sumber daya manusia memegang peranan penting dalam menentukan kualitas laporan keuangan. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Menurut (Hitawasana & Dewi, 2023) yang telah melakukan penelitian di Kabupaten Buleleng menemukan bahwa keterampilan sumber daya manusia, akuntansi, sistem informasi akuntansi, dan pemahaman sistem pengendalian intern secara kolektif memberikan kontribusi positif terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, Penelitian lain menunjukkan bahwa kapabilitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keberlanjutan kualitas pelaporan keuangan di sektor publik (Hastuti, 2023).

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi adalah proses pengolahan dan penyebaran data yang dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer dan telekomunikasi untuk berbagai kegiatan yang dilakukan oleh individu. Teknologi informasi di Indonesia berkembang seiring dengan semakin modernnya perkembangan peradaban manusia (Yuli Ernawati et al., 2019). Dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin maju, teknologi informasi mempunyai fitur yang akurat dan akurat serta dapat menyimpan data dalam jumlah yang lebih besar, sehingga memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan dan penerapan informasi keuangan.

(Budiman & Fanny Jouke Doringin, 2023) Di dalam dunia organisasi, informasi yang berkualitas sangat bergantung pada peran komponen

teknologi. Sebagai produk dari sistem teknologi informasi, informasi ini memiliki fungsi penting dalam memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pengambil keputusan, termasuk dalam hal pelaporan. Kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Dengan membangun jaringan sistem informasi manajemen dan memperlancar proses kerja, pemerintah dapat beroperasi secara terpadu, serta menyederhanakan akses antar unit kerja.

5. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal memastikan bahwa laporan keuangan dihasilkan secara akurat dan transparan. Penelitian terhadap BUMDes menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang baik dapat mencegah terjadinya kecurangan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana (Priandini & Biduri, 2023). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern (SPI) diartikan sebagai suatu proses yang integral dalam setiap tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh para pemimpin dan seluruh pegawai. Proses ini bertujuan memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan dalam laporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada dasarnya adalah pernyataan dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan mengenai kondisi keuangan pemerintah kepada para pemangku kepentingan. Proses pelaporan keuangan ini sangat penting untuk memenuhi tanggung jawab pemerintah dalam hal akuntabilitas publik. Selain itu, pelaporan keuangan juga berperan dalam memenuhi kebutuhan pengguna laporan yang memiliki keterbatasan dalam kewenangan dan kemampuan untuk mengakses informasi. Dengan demikian, mereka sangat bergantung pada laporan keuangan sebagai sumber informasi yang krusial (HIDAYAT & BAHTIAR, 2021).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kerangka hukum yang penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam Pasal 67, ditekankan betapa pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, yang menjadi landasan bagi penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Pasal 68 menetapkan kewajiban bagi BUMDes untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan, yang mencakup seluruh kegiatan serta penggunaan anggaran. Hal ini tentunya akan meningkatkan relevansi dan akuntabilitas informasi yang disajikan. Sementara itu, Pasal 69 menekankan perlunya adanya audit terhadap laporan keuangan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa laporan tersebut memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan.

Dampak dari ketentuan ini terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes sangatlah signifikan. Kewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban dan melakukan audit ini meningkatkan akuntabilitas para pengelola BUMDes, sehingga mereka terdorong untuk lebih berhati-hati dalam mengelola dan melaporkan keuangan. Selain itu, transparansi dalam penyampaian laporan keuangan kepada masyarakat dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMDes. Dengan demikian, melalui pengembangan kapasitas para pengelola dalam menyusun laporan sesuai dengan standar akuntansi, diharapkan kualitas laporan keuangan BUMDes dapat meningkat. Penelitian ini memberikan bukti bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pengelolaan keuangan desa akan mendukung pengembangan ekonomi desa secara berkelanjutan.

C. Pengembangan Hipotesisi

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu masalah yang dihadapi dan perlu diuji kebenarannya dengan data yang mendukung.

1. Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut (Kusumawardhani & Muanas, 2020) Kompetensi mengacu pada karakteristik kepribadian seseorang dan standar perilaku yang memastikan bahwa seseorang melakukan tugas atau situasi tertentu secara efektif atau lebih baik. Pelaporan keuangan merupakan hasil kerja departemen SDM. Untuk menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi, untuk memerlukan profesional pelaporan keuangan yang berkualifikasi.

Terdapat hubungan positif dan signifikan antara sumber daya manusia kualitas laporan keuangan BUMDes. Oleh karena itu, semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia, semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang disusun oleh BUMDes. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Khoirunisa & Khoiriawati, 2022) yang menyatakan bahwa kompetensi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan menurut Aryani, N. K. D., & Muliati, N. K. (2020), sumber daya manusia yang berkompeten di bidang akuntansi maka laporan keuangan perusahaan akan lebih berkualitas. Munculnya potensi penuh akan bertambah seiring berjalanya waktu.

Hasil penelitian yang mendukung pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan yaitu dilakukan oleh Rahmawati, E., Sonita, S., Kholid, A. W. N., & Sofyani, H. (2022), menyelidiki kualitas laporan keuangan manajemen daerah sebagai mediator bagian kompetensi Personalia, peran pengendalian internal. Kompetensi personel mengacu pada kemampuan seorang pegawai atau sistem dalam melaksanakan tugas atau amanahnya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan pengetahuan dan keahliannya. melaksanakan tugas dalam organisasi. Kompetensi pribadi diukur dengan tiga indikator, yaitu a) Sikap perilaku, b) Pengetahuan, c) Keterampilan. Kuesioner untuk mengukur variabel kompetensi SDM. Kompetensi pegawai berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan suatu pemerintah daerah.

2. Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan

Dalam masyarakat modern saat ini, penggunaan teknologi informasi telah menjadi suatu hal yang penting. Teknologi informasi dapat membantu departemen SDM dalam mengelola keuangan mereka. Data keuangan disiapkan oleh departemen sumber daya manusia didepartemen akuntansi, namun kesalahan manusia dapat diminimalkan melalui penggunaan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan, serta penyajian laporan keuangan dan output lainnya lebih tepat waktu, dengan kata lain pemanfaatan teknologi informasi yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan (Saputra et al., 2020).

Pengolahan data menjadi informasi dengan bantuan komputer tentunya akan meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan (Andi Kusnadi et al., 2022). Dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi, kualitas laporan keuangan dapat mengalami peningkatan yang signifikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharuskan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada, guna meningkatkan kapabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 56 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Hasil penelitian sebelumnya yaitu (Ariska et al., 2023). Penelitian mereka menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

3. Hubungan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

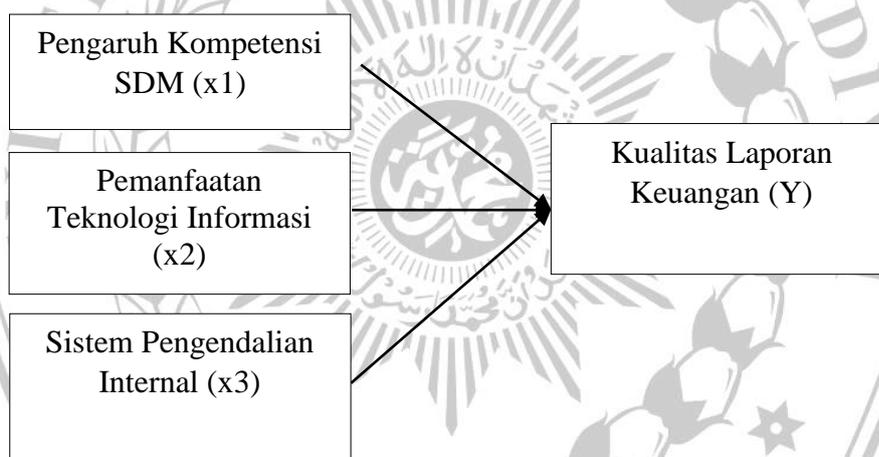
Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut (I. Firmansyah & Sinambela, 2021)(Firmansyah & Sinambela, 2021) sebuah perusahaan dapat dikatakan berkembang bila perusahaan tersebut dapat menampilkan kinerja terbaik dengan sumber daya manusia yang berkompeten agar dapat bersaing dengan perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan sistem yang baik dengan meningkatkan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang baik diperlukan demi menciptakan tujuan perusahaan. Sistem Pengendalian Internal sangat dibutuhkan untuk kegiatan pengawasan terhadap sistem akuntansi sehingga pada akhirnya akan menghasilkan informasi yang dibutuhkan perusahaan dalam mengambil keputusan serta dukungan fungsi penyediaan pihak manajemen dan mendukung operasional harian perusahaan.

Menurut (Komang Sartika Dewi.,2019) meneliti dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan dan Pengawasan Keuangan Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). data

berupa data hasil kuesioner terkait sistem pengendalian intern, pengawasan keuangan daerah, dan nilai informasi laporan keuangan pada SKPD di Kabupaten Buleleng, dan data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen pendukung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan analisis jalur. Pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi keuangan daerah bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

D. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual